

## PENGARUH GINI RASIO, PENGELUARAN NON MAKANAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

Gek Ayu Nina<sup>1</sup>, Surya Dewi Rustariyuni<sup>2</sup>

1. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia*

2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia*

Email: ayunina0268@gmail.com, surwidwirca@gmail.com

---

### **Abstract**

*Economic development in Indonesia is essentially building a whole person, so that it can improve people's welfare. Community welfare is one of the goals of the SDGs and is a reflection of the success of development carried out by the government, measured using the Human Development Index (HDI). Bali's HDI as a whole continues to increase, but the difference in HDI figures that is quite far between the districts / cities in Bali is an important problem to overcome. This difference shows that there is an inequality between regions. The research objectives to be achieved are: 1) to analyze the influence of the ratio gini, non-food expenditure per capita, and capital expenditure on poverty in the regency / city of Bali Province; 2) To analyze the influence of the ratio gini, non-food expenditure per capita capital expenditure and poverty on the welfare of the people in the regency / city of Bali Province; and 3) To analyze the influence of the ratio gini, non-food expenditure per capita and capital expenditure through poverty on the welfare of the people in the regency / city of Bali Province. The analysis technique uses path analysis and the results of Gini ratio research and capital expenditure have no effect on the number of poor people while non-food expenditure has a positive and significant effect. The results of testing the Gini Ratio variable on public welfare, this ratio, non-food expenditure and the number of poor people have a positive and significant effect on the welfare of society while capital expenditure has no influence.*

**Keyword :** *gini ratio, HDI, number of poor people, capital expenditure*

**JEL Classification:** *E65, H76*

---

### **1. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murwanto, 2014). Pada tataran global, "Deklarasi Millennium" yang ditandatangani di New York tahun 2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dikenal sebagai *Millennium Development Goals* atau MDGs. Setelah tujuan era MDGs berhasil dicapai, selanjutnya era SDGs (*Sustainable Development Goals*) dimulai dan dirancang untuk meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs sebelumnya.

Kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari SDGs dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (M. & U. A. Putra, 2015).

IPM sebagai salah satu dari indikator alternatif, untuk menilai kesejahteraan masyarakat, mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merupakan refleksi dari pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Peluang hidup, 2) Pengetahuan, 3) Hidup layak (Sanggalorang, S., Vekie R., 2015). Kesejahteraan masyarakat jika ditinjau

secara nasional pasca krisis tahun 1997 terus meningkat disetiap periodenya. Kesejahteraan masyarakat ketika memasuki akhir tahun 2008, mengalami goncangan akibat terjadi krisis global di tahun 2008-2009 dan pada akhirnya mengalami penurunan yang tajam di tahun 2010.

Setiawan & Hakim (2013), penurunan IPM saat krisis global memberikan dampak yang signifikan terhadap angka IPM di Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011 hingga saat ini. Pada tahun 2016 Provinsi Bali menyanggah posisi keempat nasional dengan nilai IPM dalam kategori menengah yakni sebesar 73,65 persen. Ketika dilihat lebih dalam lagi, ternyata terdapat lima kabupaten yang masih memiliki nilai IPM di bawah rata-rata provinsi.

IPM Bali secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, namun perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Bali menjadi suatu masalah yang penting untuk diatasi. Perbedaan tersebut menunjukkan terjadi ketidakmerataan antar daerah (Melliana, 2013). Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah jumlah penduduk miskin (Widyastuti, 2012). Dalam keadaan yang dikategorikan miskin, maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pokok pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak (Sasana, 2009). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian (Chalid, N. & Yusuf, 2014; Manik, 2013; Widodo, A., 2011) yang memperoleh hasil bahwa kemiskinan memiliki korelasi yang negatif dengan angka IPM sebagai indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDGs dengan dinyatakankannya *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Bali (Ishartono & Santoso, 2016).

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, (Pratowo, 2013), (Yasa, 2015) menyimpulkan bahwa ketimpangan yang diukur dengan rasio gini, memiliki korelasi yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian (Rustariyuni, 2014), bahwa gini rasio memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh jumlah penduduk pada ketimpangan distribusi pendapatan menurut Nurlaili (2016) memperoleh hasil bahwa jumlah penduduk memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan masyarakat menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali tercermin pada pengeluaran non makanan per kapita (Rustariyuni, 2014).

Semakin meningkatnya proporsi pengeluaran non-makanan masyarakat, mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dibandingkan bahan non-pangan (Pratowo, 2013). Kemudian Subarna (2012), menjelaskan bahwa pengeluaran non-makanan seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang dilakukan oleh penduduk kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan rendah seharusnya lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. (Finkayana & Dewi, 2016) menyatakan bah-

wa pengeluaran per kapita memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat tiga tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pertama, untuk menganalisis pengaruh gini rasio, pengeluaran non-makanan per kapita, dan belanja modal terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Kedua, untuk menganalisis pengaruh gini rasio, pengeluaran non-makanan per kapita belanja modal dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh gini rasio, pengeluaran non-makanan per kapita dan belanja modal melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Teori Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Pigou adalah kepuasan agregat dari seluruh individu di dalam masyarakat. Kesejahteraan individual ditunjukkan oleh kepuasan yang diperoleh individu atas konsumsi barang dan jasa yang dikaitkan dengan pendapatan riil (Skousen, 2005). Vilfredo Pareto, seorang ekonom Itali merumuskan terciptanya kondisi efisien dari alokasi sumber daya yang dikenal dengan Syarat Pareto. Syarat Pareto adalah suatu keadaan di mana alokasi barang dan jasa berlangsung dengan adil, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan (Mankiw, 2011). Sejahtera menunjuk pada suatu keadaan yang lebih baik, kondisi di mana orang-orang berada dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Masyarakat yang sejahtera adalah mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani (Prastyadewi, I., 2013).

### Konsep Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nation Development Program*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan manusia sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang normal (Mahesha & Shivalingappa, 2011).

### Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dialami oleh negara berkembang (Ikejiaku, 2009) Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kebijakan program pembangunan ekonomi guna mempercepat laju pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang baik, seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung (Astrini, N. M. M. & Purbadharmaja, 2013). Menurut (Budhi, 2013), kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai masalah dalam dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

### Konsep Pengeluaran Non Makanan per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Perhitungan pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\frac{\text{Total pengeluaran anggota rumah tangga dalam sebulan}}{\text{Jumlah anggota rumah tangga}} \times 100\%$$

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non-makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran nonmakanan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap proporsi pengeluaran untuk makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Jadi, tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menurut BPS dapat diproksi dengan proporsi pengeluaran non-makanan.

### **Konsep Belanja Modal**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang (APBD). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang merupakan bagian dari rincian belanja lang-

sung yang memiliki manfaat secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa manfaat dari belanja daerah melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

### **Kerangka Konseptual**

Konsep penelitian ini menganalisis tentang kesejahteraan masyarakat per kabupaten/kota di Provinsi Bali. Beberapa faktor seperti gini rasio, pengeluaran non makanan dan belanja modal akan mempengaruhi persentase penduduk miskin sehingga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan angka IPM dalam satuan persen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah gini rasio, pengeluaran non makanan

dan belanja modal. Variabel *intervening* yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk miskin yang ada di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali.

Kesejahteraan rumah tangga juga dapat diidentifikasi melalui besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Sehingga, tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diproksi dengan proporsi pengeluaran non-makanan (Rustariyuni, 2014). Pengeluaran non-makanan yang tinggi dari keseluruhan pengeluarannya berarti kesejahteraan masyarakat semakin tinggi karena pengeluaran non makanan yang meliputi pengeluaran untuk kesehatan maupun pendidikan merupakan komposit yang digunakan dalam mengukur angka IPM.

Hubungan antara pengeluaran non-makanan dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chalid (2010) memperoleh hasil bahwa antara pengeluaran nonmakanan dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan negatif, sedangkan Pratowo (2013), Latifah & Darsyah (2017), dan Sutawijaya, Angger, Rochaeni, & Achmad (2013) menemukan bahwa pengeluaran non makanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM.

Menurut Kumalasari (2011) Terdapat tiga dimensi dari ukuran IPM yakni pertama dimensi kesehatan, kedua dimensi pendidikan dan yang ketiga adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup

layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Menurut Santosa (2013) semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang didukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada hidup yang lebih sejahtera. Hubungan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan telah diteliti oleh (Finkayana, A. & Dewi, 2016) dan (Kumalasari, 2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada jumlah penduduk miskin disuatu daerah sebab semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pemerintah sebagai *agent of development* memiliki peranan dalam pembangunan suatu daerah khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu sarana yang dapat digunakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah belanja modal. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembuatan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Yustie & Heriqbaldi (2014) dan Kotambunan, Sutomo, & Richard (2016) menemukan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan

terhadap kemiskinan. Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto, Utami, & Nurmansyah (2016) menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif.

Dalam pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaannya juga memerlukan tenaga kerja. Hal itu akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat juga telah diteliti oleh Zebua (2014), Hukom (2015) dan Umiyati, Amril, & Zulfanetti (2017) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh pada IPM dengan arah yang positif dan signifikan. Selain itu, Hendarmin (2012) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IPM, faktor-faktor tersebut salah satunya adalah belanja modal pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Muda, Helmi, & Kholis (2014) dan Badrudin (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia di antara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah men-

jadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2011).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Hubungan antara kemiskinan dan IPM dalam penelitian Chalid & Yusuf (2014), Dewi (2017), Manik (2013), Mirza (2011), Suwandi (2016) dan Widodo et al. (2011) yaitu negatif dan signifikan. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan, karena dengan kemiskinan maka seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan (Sasana, 2009).

### 3. METODE PENELITIAN

#### Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis jalur (*Path Analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel *intervening*.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_1 \quad (2)$$

$$Y_2 = \alpha + b_4X_1 + b_5X_2 + b_6X_3 + b_7Y_1 + e_2 \quad (3)$$

Keterangan :

$Y_1$  = Kemiskinan

$Y_2$  = Kesejahteraan masyarakat

$\alpha$  = konstanta

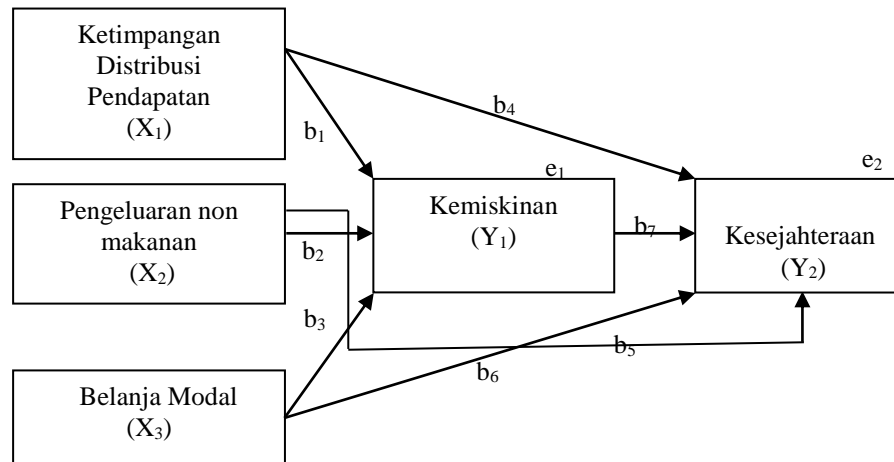
$b_{1,2,3,4,5,6,7}$  = koefisien regresi atau slope

$X_1$  = Gini rasio

$X_2$  = Pengeluaran non makanan per kapita

$X_3$  = Belanja Modal

$e$  = variabel pengganggu



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali  
 Sumber :Penulis, 2018

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non-makanan dan Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non-makanan dan Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Nonmakanan dan Belanja Modal secara langsung terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil pengujian Gini Rasio terhadap jumlah penduduk miskin pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan nilai sig. 0.976 > 0.05, memiliki arti bahwa Gini rasio tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut berarti semakin tinggi ketimpangan distribusi penda-

patan yang diproksikan melalui gini ratio tidak akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dengan anggapan faktor lainnya konstan. Pengeluaran non makanan dengan nilai sig. 0.000 < 0.05 menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut berarti setiap kenaikan pengeluaran non makanan sebesar seribu rupiah, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 0,163 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Berbeda dengan pengeluaran non makanan yang memiliki nilai yang berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, belanja modal dengan sig. 0.572 < 0.05 menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Tabel 1. Hasil Pengaruh Pendapatan Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk Misikin.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1												
(Constant)	59.210	2.816		21.026	.000	53.553	64.866					
GINI RATIO	.254	8.426	.001	.030	.976	-16.671	17.178	.226	.004	.001	.821	1.217
PNM	.023	.001	.935	17.147	.000	.021	.026	.951	.924	.747	.638	1.567
BELANJA MODAL	7.38E-010	.000	.031	.569	.572	.000	.000	.495	.080	.025	.658	1.519

a. Dependent Variable: JPMISKIN

Sumber : hasil olah data penelitian, 2018

### Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan, belanja modal dan jumlah penduduk miskin terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan, belanja modal dan jumlah penduduk miskin terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai sig.  $0.006 < 0.05$  hal tersebut memiliki arti yaitu, gini rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila gini rasio naik satu persen, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,006 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Pengeluaran non makanan dengan nilai sig.  $0.031 < 0.05$  menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila pengeluaran non makanan naik seribu rupiah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,031 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Nilai sig.  $0.383 > 0.05$  menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki hubungan atau tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan faktor lainnya konstan. Variabel Jumlah penduduk miskin dengan nilai sig.  $0,034 < 0,05$  menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila jumlah penduduk miskin satu persen, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,031 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Tabel 2. Hasil Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap

Model	Coefficients <sup>a</sup>													
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics			
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	12.638	3.787		3.338	.002	5.028	20.247						
	GINI RATIO	10.392	3.612	.198	2.877	.006	3.134	17.650	-.002	.380	.180	.821	1.217	
	PNM	-.003	.002	-.455	-2.220	.031	-.006	.000	-.860	-.302	-.139	.093	10.780	
	BELANJA MODAL	-4.8E-010	.000	-.067	-.861	.393	.000	.000	-.547	-.122	-.054	.654	1.529	
	JPMISKIN	-.132	.061	-.442	-2.182	.034	-.254	-.010	-.863	-.298	-.136	.095	10.529	

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : hasil olah data penelitian, 2018

### Hasil Pengujian Analisis Jalur

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Persamaan struktur 1

$$Y_1 = 0,001 X_1 + 0,935 X_2 + 0,031 X_3 + e_1$$

Persamaan struktur 2

$$Y_2 = 0,198 X_1 - 0,455 X_2 - 0,067 X_3 - 0,442 Y_1 + e_2$$

### Nilai kekeliruan taksiran standar

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah varian variabel jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh gini rasio ( $X_1$ ), pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $X_3$ ), maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,905^2} = 0,181$$



Untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh Gini Rasio ( $X_1$ ), pengeluaran non makanan ( $X_2$ ), belanja modal ( $X_3$ ) dan jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ), maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,809^2} = 0,346 \end{aligned}$$

### Pemeriksaan Validitas Model

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,181)^2 (0,346)^2 \\ &= 1 - (0,033) (0,119) \\ &= 1 - (0,004) \\ &= 0,996 \end{aligned}$$

Keterangan:

$R_m^2$  = Koefisien determinasi total

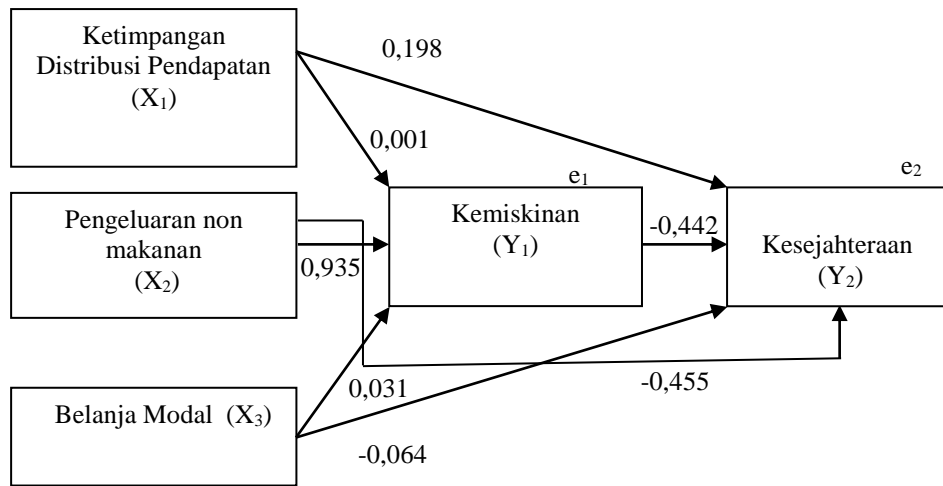
$e_1, e_2$  = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99,6 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 99,6 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 0,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

### Hasil Pengujian

- 1) Pengujian pengaruh langsung
  - a. Pengaruh langsung Gini Rasio terhadap jumlah penduduk miskin.  
Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,001 dan nilai probabilitas sebesar 0,976 > 0,05, artinya Gini Rasio ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap ju-

mlah penduduk miskin ( $Y_1$ ). Tidak terdapat hubungan antara variabel gini rasio terhadap jumlah penduduk miskin. Berarti bahwa semakin meratanya distribusi pendapatan suatu daerah tidak dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian L. D. Putra (2011), dan (Rodriguez-Pose, 2015) yang memperoleh hasil bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Ketimpangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan adalah bentuk dari kemiskinan. Hal tersebut juga searah dengan statistik yang menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013). Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan variabel gini rasio tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin disebabkan oleh angka ketimpangan dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas (Syawie, 2012). Selain itu gini rasio juga memiliki kelemahan dalam menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan yang sesungguhnya.



Gambar 2 Diagram Hasil Analisis Jalur

- b. Pengaruh langsung Pengeluaran Non Makanan terhadap Jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,935 dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ). Hubungan negatif antara variabel pengeluaran non makanan terhadap jumlah penduduk miskin, dapat dijelaskan melalui penelitian Fin-kayana & Dewi (2016) dan Kumalasari (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan lebih tinggi.

Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, se-

makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga (Rustariyuni, 2014). Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran perkapita yang semakin besar memiliki proporsi pengeluaran non makanan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan. Santosa (2013) menjelaskan kemampuan daya beli masyarakat jika dilihat dari pengeluarannya yang didukung dengan pendapatan yang semakin tinggi dan dapat diproksi melalui pengeluaran non makanan tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan.

- c. Pengaruh langsung Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,031 dan nilai probabilitas sebesar  $0,572 > 0,05$ , artinya belanja modal ( $X_3$ ) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ). Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustie & Heriqbaldi (2014) dan Kotambunan et al. (2016) yang menemukan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh alokasi belanja daerah khususnya belanja modal yang kurang efektif dan efisien guna memanfaatkan sumber daya. Dilihat dari alokasi belanja modal selama enam tahun terakhir terdapat penurunan di beberapa daerah kabupaten di Bali dan masih banyak daerah yang belum menyediakan fasilitas umum yang memadai.

Berdasarkan alasan tersebut, belanja modal pemerintah yang secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan, melalui pembuatan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan tidak dapat tercapai.

- d. Pengaruh langsung Gini Rasio terhadap Jumlah Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,198 dan nilai probabilitas sebesar  $0,006 < 0,05$ , artinya gini rasio ( $X_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Hubungan negatif antara variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Patta (2012), Niyimbanira (2017), Pratowo (2013), dan Yasa & Sudarsana (2015) yang memperoleh hasil

bahwa Gini Rasio dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan. Hubungan yang negatif antara gini rasio yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa jika distribusi pendapatan semakin merata maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal penting yang harus di pertimbangkan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi suatu daerah karena ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

- e. Pengaruh langsung Pengeluaran Non Makanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,455 dan nilai probabilitas sebesar  $0,031 < 0,05$ , artinya pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Hubungan positif antara variabel pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Pratowo (2013), Latifah & Darsyah (2017), dan Sutawijaya, Angger et al. (2013) menemukan bahwa pengeluaran non makanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IPM. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk

konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Sehingga, tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diproksi dengan proporsi pengeluaran nonmakanan (Rustariyuni, 2014).

Pengeluaran non makanan yang tinggi dari keseluruhan pengeluarannya berarti kesejahteraan masyarakat semakin tinggi karena pengeluaran non makanan yang meliputi pengeluaran untuk kesehatan maupun pendidikan merupakan komposit yang digunakan dalam mengukur angka IPM.

- f. Pengaruh langsung Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,067 dan nilai probabilitas sebesar 0,383 > 0,05 ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya belanja modal ( $X_3$ ) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Muda et al. (2014) dan Badrudin (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan oleh masalah alokasi

Belanja Modal yang tidak signifikan berperan membiayai pembangunan. Rata-Rata alokasi belanja Modal di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali hanya sebesar 15 persen. Selain itu perkembangan belanja modal selama enam tahun terakhir di beberapa daerah terdapat penurunan pada tahun tertentu dalam pengalokasiannya disebabkan semakin banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah di mana APBD yang dialokasikan banyak untuk keperluan Belanja Tidak Langsung.

Saragih menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dampak penggunaan belanja modal akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal

untuk kepentingan pelayanan publik.

- g. Pengaruh langsung Jumlah Penduduk Miskin terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,442 dan nilai probabilitas sebesar  $0,034 < 0,05$ , artinya jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chalid, N. & Yusuf, 2014; Dewi, 2017; Manik, 2013; Mirza, 2011; Suwandi, 2016; Widodo, A., 2011) yaitu jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan dapat menimbulkan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks. Kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan awalnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok, kemudian kemiskinan akan berpengaruh terhadap penurunan indikator-indikator yang ada dalam IPM. Penurunan indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat terjadi karena dengan kemiskinan maka seseorang akan

mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak (Sasana, 2009).

Hal tersebut menjadikan *gap* pembangunan manusia di antara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2011).

- 2) Pengaruh tidak langsung  
 a. Pengaruh tidak langsung Gini Rasio terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin

$$S_{\beta_1, \beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_1, \beta_7} = \sqrt{(0,132)^2 (8,426)^2 + (0,254)^2 (0,061)^2}$$

$$S_{\beta_1, \beta_7} = 1,1116$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1 \beta_7}{S_{\beta_1, \beta_7}}$$

$$z = \frac{(0,254)(0,132)}{1,1116}$$

$$z = 0,0271$$

Oleh karena z hitung sebesar 0,0302 lebih kecil dari 1,96 berarti jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) bukan merupakan variabel *intervening* pengaruh tidak langsung gini rasio ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2016.

Variabel jumlah penduduk miskin bukan sebagai *intervening* antara variabel gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai z hitung sebesar

0,0302 < 1,96 yang berarti jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) bukan variabel mediasi pada pengaruh variabel gini rasio ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Miranti, 2010) yang menyatakan bahwa, jika distribusi pendapatan menjadi setara atau merata maka hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan, begitu juga sebaliknya.

Menurut Todaro (2000), pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin.

Variabel Jumlah penduduk miskin bukan merupakan variabel *intervening* hubungan antara variabel gini rasio dan kesejahteraan masyarakat karena ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan gini rasio memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan pengukuran ketimpangan dengan Indeks Williamson (L. D. Putra, 2011). Selain itu ketimpangan distribusi pendapatan dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas (Syawie, 2012). Tidak adanya pengaruh antara variabel Gini Rasio terhadap jumlah penduduk miskin tentu menyebabkan variabel jumlah penduduk miskin tidak memediasi hubungan antara variabel Gini Rasio dengan

ukuran Kesejahteraan Masyarakat yang diproksikan dengan IPM.

- b. Pengaruh tidak langsung pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(0,132)^2 (0,001)^2 + (0,023)^2 (0,061)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,0014$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_2\beta_7}{S_{\beta_2\beta_7}}$$

$$z = \frac{(0,023)(0,132)}{0,0014}$$

$$z = 2,1686$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,1686 lebih besar dari 1,96 berarti jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) merupakan variabel *intervening* dalam pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di kabupaten/kota Provinsi Bali, atau dengan kata lain pengeluaran non makanan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin sebagai variabel *intervening* hubungan antara pengaruh pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin merupakan variabel mediasi pada pengaruh gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur IPM yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan tiga indikator. Indikator yang per-

tama yaitu dimensi kesehatan, kedua dimensi pendidikan dan yang ketiga adalah standar hidup layak.

Dalam cakupan yang lebih luas, indikator ketiga yaitu standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian suatu daerah. Kehidupan yang layak dapat dilihat melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Menurut (Santosa, 2013) semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang didukung oleh pendapatan yang semakin tinggi tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat akan terlepas dari kemiskinan dan menuju pada hidup yang lebih sejahtera.

Hubungan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan telah diteliti oleh Fin-kayana, A. & Dewi (2016) dan Kumalasari (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada jumlah penduduk miskin di suatu daerah yang selanjutnya menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

- c. Pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin.

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_3}^2 + \beta_3^2 S_{\beta_7}^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(0,132)^2 (0,000)^2 + (7,38e^{-10})^2 (0,061)^2}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = 0,00002$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menggunakan nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_3\beta_7}{S_{\beta_3\beta_7}}$$

$$z = \frac{(7,38e^{-10})(0,132)}{0,00002}$$

$$z = 2,2113$$

Oleh karena z hitung sebesar 2,2113 lebih besar dari 1,96 berarti jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) merupakan variabel *intervening* dalam hubungan antara variabel belanja modal ( $X_3$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) di kabupaten/kota Provinsi Bali, atau dengan kata lain pengeluaran belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin sebagai variabel *intervening* hubungan antara pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin merupakan variabel mediasi pada pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai *agent of development* memiliki peranan dalam pembangunan suatu daerah khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu sarana yang dapat digunakan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin adalah melalui belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah

(Sendouw, Rumate, & Rotinsulu, 2009).

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembuatan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Kotambunan et al., 2016; Yustie & Heriqbaldi, 2014) menemukan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widianto et al., 2016) menemukan bahwa variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif. Dalam pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal untuk pembangunan sarana dan pra-sarana yang dalam pelaksanaannya juga memerlukan tenaga kerja. Hal itu akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang

berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan. Penghasilan yang diperoleh kemudian digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat dikategorikan hidup layak yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat juga telah diteliti oleh Zebua (2014), (Hukom, 2015; Umiyati et al., 2017) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh pada IPM dengan arah yang positif dan signifikan. Selain itu, (Hendarmin, 2012) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IPM, faktor-faktor tersebut salah satunya adalah belanja modal pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Muda et al. (2014) dan Badrudin (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Tabel 3. Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel

Hubungan		Pengaruh		Total
Variabel		Langsung	Tidak Langsung	
		Melalui Y1		
X1→	Y1	0,0001		0,0001
X1→	Y2	0,198	0,0335	0,2315
X2→	Y1	0,935		0,935
X2→	Y2	0,445	0,003	0,448
X3→	Y1	0,031		0,031
X3→	Y2	0,067	0,00004	0,06704
Y1→	Y2	0,442		0,442

Sumber : hasil penelitian, 2018



Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung gini rasio ( $X_1$ ) terhadap jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) adalah 0,0001, tidak ada pengaruh tidak langsung di antara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,0001 yang artinya pengaruh langsung gini rasio terhadap jumlah penduduk miskin secara langsung sebesar 0,01 persen. Pengaruh tidak langsung dari gini rasio ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) adalah sebesar 0,0335. Nilai ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin adalah sebesar 3,35 persen, sehingga pengaruh totalnya adalah 0,2315.

Pengaruh langsung pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) terhadap jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) adalah 0,935. Hubungan antara variabel pengeluaran non makanan terhadap jumlah penduduk miskin tidak terdapat pengaruh tidak langsung, sehingga pengaruh totalnya 0,935 yang artinya pengaruh langsung pengeluaran non makanan terhadap jumlah penduduk miskin secara langsung sebesar 93,5 persen.

Pengaruh tidak langsung pengeluaran non makanan ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui jumlah penduduk miskin ( $Y_1$ ) adalah sebesar 0,003, nilai ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin adalah sebesar 0,03 persen. Pengaruh langsung belanja

modal ( $Y_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) adalah 0,478, tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,478 yang artinya pengaruh langsung pengeluaran non makanan terhadap belanja modal secara langsung sebesar 47,8 persen.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN**

Gini rasio tidak berpengaruh, pengeluaran non-makanan per kapita berpengaruh negatif (signifikan), dan belanja modal tidak berpengaruh positif (signifikan) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

1. Gini rasio berpengaruh negatif (signifikan), pengeluaran nonmakanan per kapita tidak signifikan, belanja modal tidak berpengaruh positif (signifikan) dan kemiskinan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.
2. Pengaruh tidak langsung gini rasio terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin adalah sebesar 3,35 persen, sehingga pengaruh totalnya adalah 0,2315. Pengeluaran nonmakanan per kapita terhadap jumlah penduduk miskin tidak terdapat pengaruh tidak langsung, pengaruh tidak langsung pengeluaran non makanan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui jumlah penduduk miskin adalah sebesar 0,03 persen. Belanja modal melalui kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,478 yang artinya pengaruh langsung pengeluaran non makanan terhadap belanja modal secara langsung sebesar 47,8 persen

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrini, N. M. M. & Purbadharmaja, I. B. P. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), 384–392.
- Badrudin, R. (2011). Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth and Welfare. *Economic Journal of Emerging Market*, 3(3), 211–223.
- Budhi, M. K. S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 1–6.
- Chalid, N. & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Chalid, N. (2010). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 28–40.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Ma-Hasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 870–881.
- Finkayana, A. & Dewi, U. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *E-Journal EP Unud*, 5(7), 861–881.
- Ganie-Rochman, M. (2013). Disparitas Pendapatan. *Kompas*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat*.
- Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3), 144–155.
- Hukom, A. (2015). Effect of Capital Expenditures, Economic Growth and Poverty On Human Development In Central Kalimantan. *Iosrjournals*, 6(6), 19–27.
- Ikejiaku, B. V. (2009). The Concept ‘Poverty’ towards Understanding in the Context of Developing Countries ‘Poverty qua Poverty.’ *Journal of Sustainable Development*, 2(2), 45–55.
- Kotambunan, L., P, S. W., & Richard, L. H. T. (2016). Analysis Effect Of Capital Expenditure And Human Development Index (Hdi) On Poverty In North Sulawesi (In Years 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah*, 16(1), 925–933.
- Kumalasari, M. (2011). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Latifah, N. & M. Y. D. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran per Kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Tek-Nologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mu-Hammadiyah Semarang*.
- Mahesha, D., Shivalingappa, B. N. (2011). Regional Disparities of Human Resource Development in South India. *E-International*

- Scientific Research Journal*, 3(4), 299–306.
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Ma-Najemen*, 9(2), 107–124.
- Mankiw, N. G. (2011). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Melliana, A. & I. Z. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–241.
- Miranti, R. (2010). Poverty in Indonesia 1984-2002: The Impact of Growth and Changes in Inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(1), 79–97.
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 102–113.
- Muda, I., Helmi, S., & Kholis, A. (2014). Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (Ikk), Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) di Sumatera Utara. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 12–29.
- Murwanto, B. (2014). Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Kelompok Wanita Pekerja Seks dan Waria. *Jurnal Kesehatan*, 5(1), 23–33.
- Niyimbaira, F. (2017). Analysis of The Impact of Economic Growth on Income Inequality And Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial*, 7(4), 254–261.
- Nurlaili, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013. Universitas Negri Yogyakarta.
- Patta, D. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. Universitas Hassanudin, Makassar.
- Prastyadewi, I., D. (2013). *Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tanganan Pegringsingan* (pp. 30–41). pp. 30–41.
- Pratowo, N. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–31.
- Putra, L. D. (2011). Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007. Universitas Diponegoro.
- Putra, M. & U. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863–877.
- R, I. & S. T. (2016). Sustainable Deirvelopment Goals (Sdgs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*, 6(2), 154–272.
- Rodriguez-Pose, A. & D. H. (2015). Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global.

- Applied Geography*, 1–13.
- Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan per kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA UNUD*, 10(1), 45–55.
- Sanggalorang, S., Vekie R., & H. S. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–11.
- Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran non makanan daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 1–15.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2009). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 10(1), 18–26.
- Setiawan, B. M. & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economica*, 9(1), 18–26.
- Skousen, M. (2005). *Sang Maestro Teori–Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Subarna, T. (2012). Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non Pangan Penduduk Jawa Barat. *Journal Bina Praja*, 4(4), 243–250.
- Sutawijaya, Angger, A., Rochaeni, S., & A. T. N. (2013). Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Ikan Hias Air Tawar di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Madya Jakarta Selatan. *Jurnal Agribisnis.*, 7(1), 59–76.
- Suwandi. (2016). The Influence of Economic Growth on Poverty, Investment, and Human Development Index in Fak, Fak District, West Papua Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF).*, 18(2), 95–104.
- Syawie, M. (2012). Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat. *Informasi*, 18(2), 95–104.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Umiyati, E., Amril, & Zulfanetti. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio-Humaniora*, 1(1), 29–37.
- Utama, S. (2012). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. (Keenam). Diktat Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Widianto, A., Utami, E. U. S., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Jurnal Research Accounting Politeknik Tegal*, 5(2), 170–176.
- Widodo, A., W. & J. M. K. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap

- Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal*, 1(2), 1–11.
- Yasa, O. A. & S. A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuan-Titatif Terapan*, 8(1), 63–71.
- Yustie, R., & Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (2007-2011). *Equilibrium*, 1.
- Zebua, W. F. (2014). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013)*. (Vol. 3). Universitas Brawijaya.